



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ARIEF S. TRINUGROHO
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HASSANUDIN
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 10 November 2023

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

Pihak Kesatu,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ARIEF S. TRINUGROHO
PEMBINA UTAMA
NIP. 19641127 199003 1 002

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Tahun : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan Penyelesaian Batas Daerah di Provinsi Sumatera Utara	Persentase penyelesaian batas Daerah	100 %
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3 - 4
3	Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang terealisasi	100 %
4	a Penguatan sistem kinerja dan tatalaksana pemerintahan	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75 %
	b Peningkatan Kebebasan sipil	Proposal permohonan belanja hibah yang ditindaklanjuti	75 %
5	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi	30 Perda/Pergub
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi	700 Perda/Perkada
		Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi	850 produk hukum
		Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	30 produk hukum
6	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan	25 Perkara
		Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	15 Kasus
7	Mewujudkan dukungan kebijakan lingkup Perekonomian Daerah	Persentase perumusan kebijakan lingkup Perekonomian yang diimplementasikan	100 %
		Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat	100 %

8	Mewujudkan proses dan pelayanan/layanan pengadaan secara elektronik yang transparan, akuntabel dan terstandar	Persentase pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %
		Pemenuhan 17 standarisasi LPSE	17 Standarisasi
9	Menciptakan Kebijakan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kebijakan yang di tetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan Daerah	20 Kebijakan
		Persentase realisasi fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95 %
10	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Indeks Pelayanan Publik	4,2
		Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %
		Nilai capaian pelaporan kinerja	15
11	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasillitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	100 %
12	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	100 %
13	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Materi Pimpinan	100 %
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 338.340.503.653	P. APBD
2. Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 4.595.949.931	P. APBD
3. Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.359.154.608	P. APBD
4. Kesejahteraan Rakyat	Rp. 790.591.805.438	P. APBD
5. Penataan Organisasi	Rp. 2.603.955.000	P. APBD

6. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 185.285.859.379	P. APBD
7. Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 4.273.977.954	P. APBD
8. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. <u>3.490.135.315</u>	P. APBD

TOTAL

Rp.1.331.541.341.278

Medan, 10 November 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



HASSANUDIN

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,



ARIEF S. TRINUGROHO
PEMBINA UTAMA
NIP. 19641127 199003 1 002